

Mengapa Brexit? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa

Yulyan Maharta Saviar - 071311233100

Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Dalam tulisan ini, dijelaskan tiga faktor yang mempengaruhi hasil referendum pada tanggal 23 Juni 2016 oleh Inggris yang memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa. Uni Eropa merupakan upaya integrasi kawasan Eropa melalui pembentukan institusi terbuka dan demokratis telah memberikan keuntungan kepada negara anggota seperti kerjasama ekonomi khususnya perdagangan dan investasi serta kemudahan bagi masyarakat juga diterima oleh Inggris sebagai bukti hubungan yang erat antara Inggris dengan Uni Eropa. Namun terjadi situasi yang bertentangan dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang diperoleh karena tidak menghindarkan keputusan Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa. Dengan menggunakan konsep terkait integrasi kawasan, kritik terhadap integrasi kawasan melalui sudut pandang *state centric* dan *welfare state* serta pengaruh dinamika politik domestik terhadap integrasi kawasan dapat dihubungkan dengan berbagai data yang menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab Inggris menarik diri dari Uni Eropa berkaitan dengan kedaulatan negara, kesejahteraan negara, dan dinamika politik domestik.

Kata Kunci: Integrasi Kawasan, Kedaulatan Negara, Kesejahteraan Negara, Dinamika Politik Domestik, Inggris, Uni Eropa

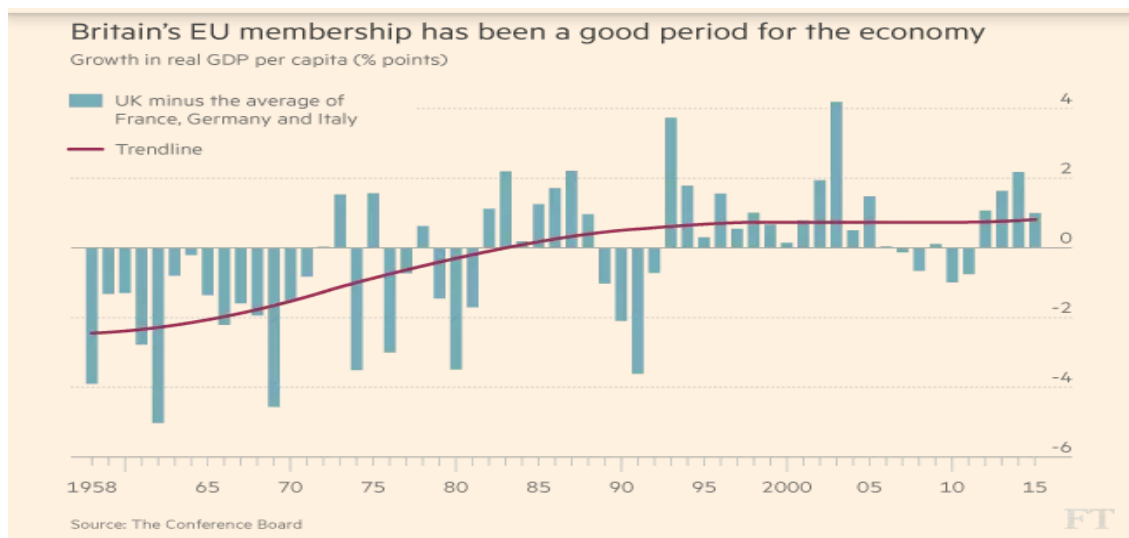
This article explain about three factors that influence the result of referendum on June 23th 2016 which make United Kingdom withdraw from European Union membership. European Union as effort to integrate European countries through institution to give advantages for member countries include United Kingdom like trade and investment cooperation also facilitation for the people so there is a close cooperation between United Kingdom and European Union. But there is contrary situation between all of the advantage that have given because United Kingdom still withdraw from European Union membership. Using the concept of regional integration, critic to regional integration through point of view state centric and welfare state and also the influence of dynamic of domestic politic to regional integration can be related with some data that show about three factor make United Kingdom withdraw from European Union that are state sovereignty, welfare state and political domestic dynamic.

Keywords: Regional Integration, State Sovereignty, Welfare State, Dynamic of Domestic Politic, United Kingdom, European Union

Uni Eropa sebagai persatuan dalam bidang ekonomi dan politik di antara 28 negara di kawasan Eropa telah berdiri setelah terjadinya Perang Dunia Kedua.¹ Uni Eropa dibentuk berdasarkan hukum aturan yang tercantum dalam perjanjian yang disetujui oleh negara anggota secara sukarela dan demokratis.² Ada berbagai tujuan mendasar terbentuknya Uni Eropa, yaitu sebagai institusi yang dapat memerintah secara terbuka dan demokratis serta menegakkan nilai kemanusiaan, kebebasan, persamaan, dan keadilan sehingga tercipta kondisi masyarakat Eropa yang damai, stabil, sejahtera.³ Tujuan tersebut dicapai melalui upaya pembentukan kebijakan dalam berbagai bidang, seperti lingkungan, iklim, ekonomi, politik, hubungan luar negeri, keamanan dan migrasi.

Hubungan antara Inggris⁴ dengan Uni Eropa cukup erat terbukti dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Inggris tumbuh secara positif selama menjadi negara anggota Uni Eropa sesuai dengan data yang tercantum dalam grafik I. Hal tersebut baik bagi Inggris sebagai negara yang mengalami krisis ekonomi saat awal masuk anggota *European Economic Community* (EEC) kemudian secara bertahap PDB per kapita Inggris mengalami peningkatan lebih baik dibandingkan Italia, Jerman, dan Prancis selama kurun waktu 40 tahun.⁵ Selanjutnya pada grafik II menjelaskan bahwa nilai perdagangan dan investasi antara Inggris dengan negara anggota Uni Eropa masih diatas nilai perdagangan dengan negara diluar Uni Eropa, yaitu negara *emerging economies* dan anggota OECD yang terjadi pada tahun 1986 sampai 2010. Data yang lebih terperinci dalam diagram I menjelaskan bahwa nilai perdagangan antara Inggris dengan negara anggota Uni Eropa khususnya EU-15 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perdagangan dengan negara Amerika Serikat, Brazil, China, India, dan Rusia secara berurutan pada tahun 1998 sampai 2013.

Grafik I Pertumbuhan Ekonomi Inggris sebagai Anggota Uni Eropa⁶



¹ European Union. "The EU in Brief." *Europa*, 28 September 2016. https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en (diakses pada 28 September 2016).

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Penggunaan nama Inggris merujuk pada nama resmi *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* sebagai negara independen berdaulat yang terdiri dari empat negara, yaitu *England, Scotland, Wales, dan Northern Ireland*. Empat negara tersebut tergabung dalam sistem pemerintahan kesatuan yang dipimpin oleh Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

⁵ Chris Giles, "What Has the EU Done for the UK?," *Financial Times*, 31 Maret 2017, <https://www.ft.com/content/202a60c0-cfd8-11e5-831d-09f7778e7377> (diakses pada 1 April 2017).

⁶ Giles, "What Has the EU Done for the UK?."

Grafik II Nilai Perdagangan dan Investasi antara Inggris dengan Uni Eropa dan negara lainnya⁷

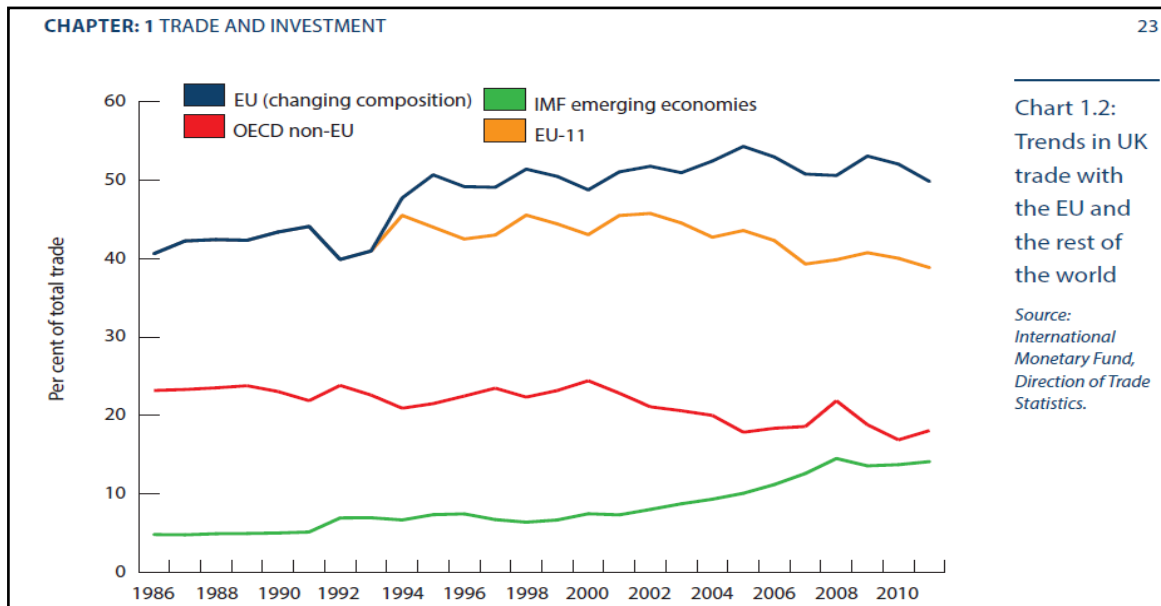
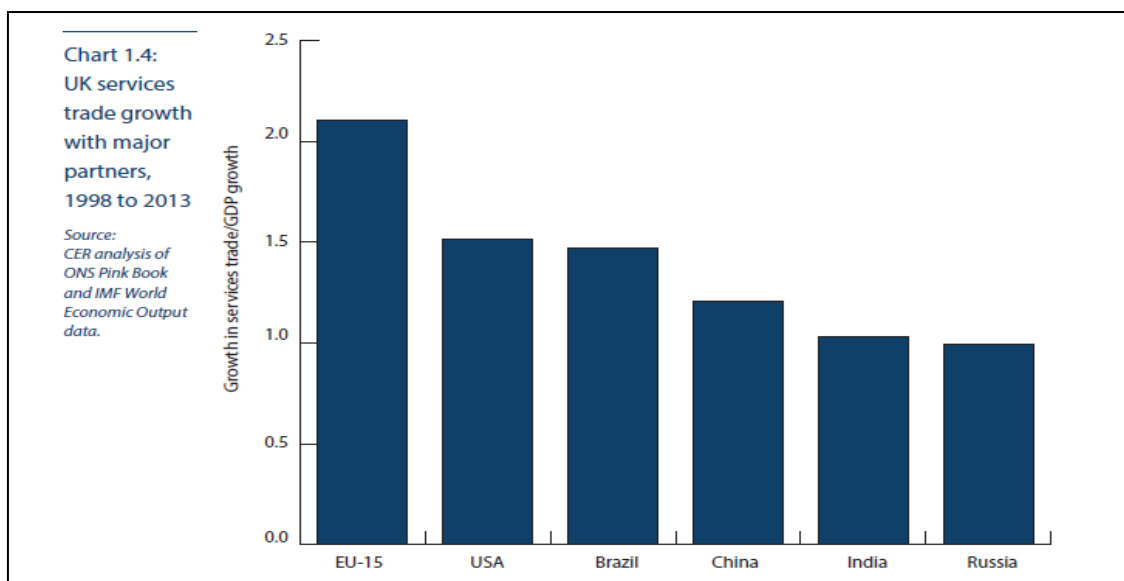


Diagram I Nilai Perdagangan antara Inggris dengan Negara Utama lainnya⁸



Uni Eropa juga memberikan berbagai kemudahan bagi warga negara Inggris sebagai negara anggota Uni Eropa, yaitu (1) kebebasan masyarakat Inggris untuk tinggal, bekerja dan pensiun di berbagai negara Uni Eropa, (2) terciptanya lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Inggris kaitannya dengan kerjasama ekspor antara Inggris dengan Uni Eropa, (3) adanya fasilitas penunjang bagi warga negara Inggris yang bepergian atau liburan di berbagai negara Uni Eropa seperti jaminan kesehatan, (4) adanya perlindungan konsumen

⁷ Springford, John, Simon Tiford, dan Philip Whyte. "The Economic Consequences of Leaving the EU." *Centre for European Reform* (2014).

⁸ Springford, John, Simon Tiford, dan Philip Whyte. "The Economic Consequences of Leaving the EU."

bagi masyarakat Inggris yang belanja di negara Uni Eropa lainnya kaitanya dalam kualitas dan keamanan produk, (5) koordinasi dan kerjasama antar negara anggota Uni Eropa dalam menjaga keamanan masyarakat Uni Eropa dari teroris, pedofil, perdagangan manusia dan kejahatan cyber, (6) pengaruh positif dari Uni Eropa pada kegiatan bisnis masyarakat Inggris⁹.

Kerjasama ekonomi yang cukup signifikan antara Inggris dengan Uni Eropa serta keuntungan bagi masyarakat Inggris tidak mempengaruhi keputusan warga negara Inggris untuk memilih menarik diri¹⁰ dari keanggotaan Uni Eropa sesuai hasil referendum¹¹ yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 yaitu 51,9% dari warga negara Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, sementara 48,1% memilih untuk tetap menjadi bagian dari anggota Uni Eropa.¹² Situasi yang bertentangan tersebut menarik bagi penulis untuk menjelaskan penyebab Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa menggunakan beberapa pendekatan atau konsep seperti kritik terhadap integrasi kawasan melalui sudut pandang *state centric* dan *welfare state* serta pengaruh dinamika politik domestik terhadap integrasi kawasan yang ditulis dalam tiga bagian berikut.

Terlebih dahulu perlu dipahami terkait integrasi kawasan yang telah dijelaskan oleh Ernst B. Haas dalam tulisannya yang berjudul *the Uniting of Europe* tahun 1958 sebagai upaya memindahkan aktivitas nasional tertentu kepada titik pusat baru.¹³ Integrasi merupakan upaya bersama antar negara dengan tujuan tertentu.¹⁴ Neofungsionalisme sebagai salah satu teori yang terbentuk untuk menjelaskan perlunya integrasi kawasan juga dikembangkan oleh Ernst B. Haas dan Leon Lindberg pada tahun 1950. Neofungsionalisme merupakan teori berdasarkan logika berfikir perlunya pembentukan institusi pada tingkat di luar batas negara.¹⁵ Ernst B. Haas menjelaskan terkait neofungsionalisme sebagai kerelaan negara dalam mempercayakan penyelesaian masalah pada tingkat internasional melalui sistem pemerintahan.¹⁶ Neofungsionalisme juga menekankan pada dinamika integrasi dan mengidentifikasi peran supranasional, transnasional, dan aktor *sub-national* dalam prosesnya.¹⁷

⁹ Kayleigh Lewis, "What Has the European Union Ever Done for Us?," *Independent*, 25 Juni 2016, www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-what-has-european-union-done-for-us-david-cameron-brexite-a6850626.html (diakses pada 28 September 2016).

¹⁰ Penarikan Inggris dari keanggotaan Uni Eropa merupakan penjelasan dari istilah *Brexit* yang digunakan penulis dalam menyusun judul. *Oxford English Dictionary* menjelaskan bahwa *Brexit is the withdrawal of the United Kingdom from the European Union*. Awal mula dari istilah *Brexit* adalah gabungan dari *British* atau *Britain* dengan *exit* yang muncul pada tahun 2012.

¹¹ The Electoral Commission. t.t. *Introduction to a referendum*, www.electoralcommission.org.uk. Referendum merupakan pemilihan langsung bagi semua pemilik hak suara untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang diusulkan. House of Lords, *Referendums in the United Kingdom*, 21. Referendum dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan isu konstitusional atau permasalahan mendasar yang dialami negara karena melibatkan peran dari masyarakat secara keseluruhan.

¹² Anon, "EU Referendum Results," *BBC News*, 24 Juni 2016, http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results (diakses pada 28 September 2016).

¹³ Yi Feng, dan Gaspare M. Genna, "Regional Integration and Domestic Institutional Homogeneity: A Comparative Analysis of Regional Integration in the Americas, Pacific Asia and Western Europe," *Review of International Political Economy*, Vol.10. No. 2, Taylor & Francis Ltd (2003), 279.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sweet dan Sandholtz. "European Integration and Supranational Governance," *Journal of European Public Policy*, (1997).

¹⁶ Feng dan Genna, "Regional Integration and Domestic Institutional Homogeneity: A Comparative Analysis of Regional Integration in the Americas, Pacific Asia and Western Europe", 280.

¹⁷ Thomas Gehring, "Integrating Integration Theory: Neo-functionalism and International Regimes." *Global Society*, Vol. 10, No. 3 (1996).

Sikap Kritis Inggris terhadap Uni Eropa

Faktor pertama yang menyebabkan Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa adalah sikap kritis Inggris terhadap penerapan aturan Uni Eropa dalam integrasi kawasan Eropa bagi negara anggotanya dapat dijelaskan melalui kritik pandangan *state centric* terhadap integrasi kawasan bahwa negara tetap menjadi poros utama dalam membentuk dan mengelola strategi pemerintahan dan kerjasama dengan pihak lain.¹⁸ Kedaulatan diciptakan untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan kehidupan yang sejahtera bagi suatu negara.¹⁹ Pandangan dari *state centric* yang menjelaskan bahwa negara atau pemerintahan nasional sebagai pembuat keputusan utama, menyerahkan sebagian kewenangan pada institusi supranasional untuk mencapai tujuan kebijakan utama.²⁰

Dalam konteks Uni Eropa yang menentukan keputusan atau aturan melalui proses perundingan diantara eksekutif negara anggota mendapat kritik dari pandangan *state centric* yang berpendapat bahwa tidak menginginkan pembuatan kebijakan ditentukan oleh eksekutif negara secara rinci, tapi hanya penentuan arah kebijakan yang tetap dikendalikan oleh masing-masing negara.²¹ Inggris dalam sejarah integrasi kawasan Eropa telah memiliki hubungan yang kritis dengan keberadaan Uni Eropa yaitu Inggris dalam proses integrasi awal kawasan Eropa telah melakukan penolakan terhadap undangan yang diajukan oleh enam negara pendiri untuk bergabung dalam EEC yang tertuang dalam perjanjian Roma tahun 1957.²² Selain itu, Inggris juga menunjukkan posisi kritis terhadap Uni Eropa dengan melaksanakan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada tanggal 6 Juni 1975, namun menghasilkan mayoritas suara 67,23% memilih tetap menjadi bagian dari EEC dan 32,77% memilih sebaliknya.²³

Kedaulatan negara menekankan bahwa negara memiliki kewenangan tertinggi dan mandiri untuk mengatur masyarakat dalam wilayahnya, meskipun negara secara sah memberikan kewenangan kepada institusi internasional.²⁴ Penjelasan terkait keutamaan negara yang memiliki kedaulatan untuk mengatur, mengawasi dan menguasai kondisi dalam negeri tersebut dapat dijelaskan melalui tiga sikap Inggris terhadap aturan yang dibuat Uni Eropa dalam proses integrasi kawasan sebagai bentuk independensi Inggris untuk menjaga kedaulatan negaranya yaitu integrasi kawasan Eropa yang menjamin kebebasan perpindahan masyarakat dengan cara menghilangkan pemeriksaan perbatasan internal negara dalam kebijakan *Schengen Area* tidak diikuti oleh Inggris dengan alasan yang disampaikan oleh Sekretaris Negara Robin Cook dari politis partai Buruh dibawah pimpinan Tony Blair yaitu Inggris merupakan sebuah kepulauan sehingga pantas untuk menjaga titik masuk dari perbatasan negara sesuai dengan kebijakan imigrasi yang telah dimiliki sendiri.²⁵ Alasan kedua adalah perjanjian Amsterdam menjadi dasar hukum legal bagi Inggris untuk menjaga perbatasan secara mandiri. Inggris memutuskan untuk menggunakan hak dalam menjaga keamanan pelabuhan laut maupun udara karena percaya sebagai sebuah cara yang efektif untuk mengatur imigran dan melawan tindak kriminal antar negara.²⁶

Sikap kedua adalah Inggris melakukan dua penolakan terhadap Perjanjian Maastricht yang diresmikan tahun 1992 berisi tiga tujuan utama, yaitu (1) pembentukan pasar tunggal Eropa dengan menggunakan mata uang tunggal; (2) pembentukan *European Central Bank* (ECB);

¹⁸ Bell, dan Hindmoor, "Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society", 3.

¹⁹ <http://www.politicalsciencenotes.com/sovereignty-introduction-classification-and-theories/777>

²⁰ Marks, "European Integration from the 1980s: State Centric v. Multi-Level Governance"

²¹ Ibid.

²² Wilson, "*Britain and the EU: A Long and Rocky Relationship*"

²³ Druol, "The UK's EU Vote: The 1975 Precedent and Today's Negotiation", 6.

²⁴ Hathaway, "International Delegation and State Sovereignty", 115.

²⁵ Coleman, *Schengen Agreement: A Short History*, 5

²⁶ Ibid.

dan (3) penyatuan kebijakan legislatif dan internal negara anggota.²⁷ Penolakan pertama berkaitan dengan posisi pemerintah John Major dari partai Konservatif berupaya untuk meneruskan kebijakan dari Perdana Menteri sebelumnya terkait penolakan integrasi keuangan Eropa melalui kebijakan *European Monetary Union* (EMU) yang terdapat dalam Perjanjian Maastricht.²⁸ Penolakan kedua adalah Inggris juga tidak menandatangani bab sosial dari perjanjian Maastricht yang tercantum dalam bagian tambahan. Bab tersebut berisi aturan umum terkait hubungan buruh dan kesejahteraan sosial di negara anggota Uni Eropa.²⁹

Sikap ketiga adalah Inggris kembali tidak mengikuti proses integrasi keuangan yang dibentuk pada era EEC sampai Uni Eropa. Dibawah pemerintahan John Major dari partai Konservatif memutuskan kebijakan kontroversial dengan keluar dari ERM sebagai proses integrasi keuangan Eropa sebelum terbentuknya EMU pada tahun 1992 yang disebabkan oleh krisis mata uang yang terjadi tahun 1992 sampai 1993 serta mempertahankan penggunaan mata uang *pound sterling*. Penolakan lainnya adalah pada tahap ketiga pembentukan EMU yang berlangsung sejak 1 Januari 1999 dengan memperkenalkan *euro* sebagai mata uang tunggal antar negara anggota³⁰, namun tidak diikuti oleh Inggris. Penolakan selanjutnya muncul saat terbentuknya Perjanjian Maastricht atau *Treaty of European Union* dibawah pemerintahan Tony Blair dari partai Buruh. Inggris menolak isi perjanjian tersebut dalam menerapkan mata uang tunggal *euro* pada tanggal 1 Januari 1999 oleh 11 dari 15 negara anggota Uni Eropa. Alasan dari penolakan oleh Inggris adalah lebih menginginkan kerjasama secara sukarela dan berdasarkan kerjasama antar negara bukan kerjasama yang mengarah pada integrasi.³¹

Beban Ekonomi dan Sosial Inggris sebagai Negara Anggota Uni Eropa

Faktor kedua yang menyebabkan Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa adalah beban ekonomi dan sosial yang ditanggung oleh Inggris sebagai negara anggota dapat dijelaskan melalui kritik bagi pandangan *welfare state* terhadap integrasi kawasan bahwa peran negara sebagai alat untuk mempromosikan dan menjaga kesejahteraan dalam masyarakat.³² Sehingga tidak boleh hanya membiarkan kesejahteraan ditentukan melalui mekanisme pasar atau proses integrasi kawasan yang diharapkan memenuhi kepentingan negara anggotanya. Negara menjadi aktor utama yang berperan memenuhi keinginan manusia melalui pembentukan pemerintah. Pada dasarnya dalam tingkat individu maupun negara, manusia berinteraksi dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan yang meliputi aspek ekonomi dan sosial meliputi ketersediaan faktor positif bagi manusia seperti kebutuhan terhadap air, makanan, udara dan barang sehari-hari seperti pakaian dan bahan bakar.³³ Selain itu juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial seperti interaksi dengan orang lain, kasih sayang, keamanan dan pengembangan diri.³⁴ Tanpa pemenuhan terhadap kebutuhan dasar dan sosial tersebut, maka kehidupan manusia akan rusak dan tidak mungkin menjalankan fungsinya sebagai manusia.³⁵

²⁷ European Union, *Treaty on European Union*

²⁸ Sorokina, *Great Britain and the European Integration*, 38.

²⁹ European Union, *Treaty on European Union*

³⁰ European Union, "Towards a Single Currency: a Brief History of EMU"

³¹ Parliament, "The ERM and the Single Currency"

³² Spicker, *The Welfare State: a General Theory*, 71.

³³ Spicker, *The Welfare State: a General Theory*, 72.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

Keberadaan institusi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pembuatnya.³⁶ Namun dapat terjadi sebaliknya apabila institusi tersebut menciptakan beban permasalahan bagi negara anggota. Beban ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh keanggotaan suatu negara dalam upaya integrasi kawasan menjadi salah satu faktor penyebab penarikan diri negara dari keanggotaan tersebut. Indikator pertama yang menjelaskan beban ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh Inggris sebagai negara anggota Uni Eropa adalah beban kontribusi keanggotaan Inggris kepada Uni Eropa. Beban kontribusi tersebut dapat dijelaskan melalui penjelasan perwakilan Bendahara, Sir Geoffrey Howe menjelaskan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Inggris kepada anggaran Komunitas Eropa lebih banyak daripada negara anggota lainnya.³⁷ Nilai kontribusi bersih Inggris pada tahun 2015 merupakan tertinggi kedua dibandingkan dengan negara anggota lainnya serta tertinggi ketiga apabila dilihat dari jumlah penduduk.³⁸ Namun secara nilai kontribusi kotor Inggris kepada Uni Eropa pada tahun tersebut menempati peringkat tertinggi ketiga dibawah Jerman dan Prancis.³⁹ Selain itu, penggunaan kontribusi yang diberikan oleh Inggris kepada Uni Eropa adalah untuk kebijakan agraria yang kurang mempresentasikan kepentingan ekonomi utama dari Inggris.⁴⁰

Indikator kedua adalah Inggris dalam melakukan integrasi kawasan melalui Uni Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun dan meningkatnya nilai pengangguran yang disebabkan krisis ekonomi di kawasan integrasi Eropa tahun 2008 sampai 2009. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Uni Eropa telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Inggris melambat sebagai contoh adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan menurun senilai 6% pada tahun 2008 sampai 2009⁴¹, serta Uni Eropa sebagai institusi antar negara di Eropa tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi tersebut sehingga *Gross Domestic Product* dari beberapa negara anggota mengalami pertumbuhan negatif atau menurun termasuk Inggris.⁴² Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi tahun 2008 juga menyebabkan pengangguran pada pasar tenaga kerja Eropa secara bertahap mengalami kenaikan.⁴³ Pengangguran meningkat secara bertahap terjadi pada perempat ketiga tahun 2008 dan kembali naik pada perempat pertama tahun 2013 dengan jumlah 27 juta pengangguran. Pengangguran tersebut juga termasuk dalam kelompok umur 15 sampai 74 tahun yang berpengaruh luas pada masyarakat.⁴⁴ Pengangguran tersebut tercatat didominasi oleh laki-laki pada tahun 2013 dengan nilai tertinggi pada negara Malta, Irlandia, Finlandia dan Inggris, namun pada beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Yunani, Denmark, Republik Ceko didominasi oleh pengangguran perempuan.⁴⁵

Indikator ketiga berkaitan dengan krisis migran yang terjadi di kawasan Eropa berdampak pada peningkatan beban ekonomi maupun sosial bagi Inggris sebagai anggota Uni Eropa. Terdapat dua krisis migran yang diidentifikasi dalam tulisan ini yang menjadi beban ekonomi dan sosial bagi Inggris. Pertama, migran yang berasal dari negara anggota Uni Eropa yaitu Inggris menjadi satu dari tiga negara (Irlandia dan Swedia) yang menjamin akses masuk bagi migran yang berasal dari delapan negara anggota Uni Eropa (EU8) pada tahun 2004 dan pada periode bulan Desember tahun 2003 sampai Desember 2004 terdapat peningkatan jumlah migran menuju Inggris senilai 66% dari 148.000 menjadi 245.000.⁴⁶

³⁶ Ibid.

³⁷ Perisic, "Britain and Europe: a History of Difficult Relations", 7.

³⁸ Keep, *The UK's contribution to the EU Budget*, 7.

³⁹ Statista, "Share of Total Contributions to the European Union Budget in 2016 by Member State"

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Clark, Drinkwater, dan Robinson. "Migration, Economic Crisis and Adjustment in the UK", 3.

⁴² Pettinger, "Economic Problems of European Union"

⁴³ Duell, Thurau, dan Vetter, "Long Term Unemployment in the EU: Trends and Policies", 13.

⁴⁴ Ibid., 12.

⁴⁵ Ibid., 16.

⁴⁶ Clark, Drinkwater, dan Robinson, "Migration, Economic Crisis and Adjustment in the UK", 2.

Jumlah migran terbesar yang datang di Inggris berasal dari Polandia sejumlah 250.000 dalam periode Mei 2004 sampai Juni 2006.⁴⁷ Kebijakan migran di Inggris dipengaruhi oleh peraturan internasional khususnya dari Uni Eropa.⁴⁸ Kebijakan Uni Eropa dalam memperluas keanggotannya berdampak pada arus migran menuju Uni Eropa sehingga menyebabkan pekerja asli Inggris perlu untuk berkompetisi dengan pasar kerja pendatang.⁴⁹ Periode tahun 1997 sampai 2004 terjadi peningkatan jumlah migran yang masuk ke Inggris dari 300.000 menjadi 600.000, meskipun nilai migran yang keluar dari Inggris juga meningkat.⁵⁰

Kedua, krisis migran meliputi pengungsi yang berasal dari negara bukan anggota Uni Eropa. *Schengen zone* yang terdiri dari 26 negara anggota Uni Eropa merupakan tujuan pengungsi di kawasan Eropa karena telah menghilangkan kendali terhadap batas wilayah negara dan memberikan perpindahan secara bebas bagi orang dan barang.⁵¹ Namun tetap Inggris sebagai negara di kawasan Eropa dan anggota Uni Eropa juga menjadi tujuan migran untuk mendapatkan suaka.⁵² Inggris menetapkan kebijakan untuk menerima 20.000 pengungsi sampai tahun 2020 yang sebelumnya telah menerima 1000 pengungsi dari Siria sampai tahun 2015 melalui *Vulnerable Persons Resettlement Programme* (VPR).⁵³ Terdapat peningkatan pengajuan suaka pengungsi kepada Inggris pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014, yaitu dari 32.120 menjadi 38.370.⁵⁴ Pada tahun 2016, Inggris menerima pengajuan suaka sejumlah 41.563 dengan rincian negara asal yaitu Iran (4.811), Pakistan (3.511), Irak (3.374), Eritrea (3.340) dan Afghanistan (3.133).⁵⁵ Uni Eropa dan negara anggotanya gagal untuk mengantisipasi arus kedatangan migran dan tidak memiliki mekanisme serta struktur yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga Uni Eropa terlambat untuk melakukan koordinasi.⁵⁶

Berbagai kelompok migran yang datang di Inggris juga berpengaruh pada beban ekonomi yang harus ditanggung oleh Inggris. Tercatat bahwa migran pada tahun 2009 sampai 2010 juga turut serta dalam mengkonsumsi pelayanan publik yang disediakan oleh Inggris meliputi pelayanan terhadap anak, disabilitas, pekerja dan kesehatan.⁵⁷ Inggris menghadapi tantangan besar dengan peningkatan jumlah kedatangan pengungsi dan migran dengan berbagai alasan seperti melarikan diri dari perang, rasa tidak aman, serta untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi mereka dan keluarganya.⁵⁸ Pengungsi dan migran yang masuk ke Eropa termasuk Inggris untuk memperbaiki kualitas kehidupannya berasal dari beragam negara serta melalui perbatasan tanpa proses pendaftaran sehingga sulit untuk menentukan jumlah secara pasti baik oleh pemerintahan lokal atau kerjasama kawasan antar negara.⁵⁹ Dampak jangka pendek dari kedatangan pengungsi terhadap situasi perekonomian adalah meningkatnya beban pengeluaran negara dalam menyediakan pelayanan publik kepada pencari suaka meliputi biaya penerimaan awal, pemukiman, makanan, pendidikan, dan kesehatan.⁶⁰ Selain itu krisis pengungsi juga berpotensi pada peningkatan pengangguran dan meningkatnya pengeluaran negara dalam memberikan

⁴⁷ Ibid., 4.

⁴⁸ Ibid., 2-3.

⁴⁹ Ibid., 4.

⁵⁰ Ibid., 5.

⁵¹ Anon, "Map of Europe Refugee Crisis 2015"

⁵² Ibid.

⁵³ Anon, "Migrant Crisis: What is the UK Doing Help?"

⁵⁴ House of Commons, *Migration Crisis*, 14.

⁵⁵ Ibid., 13.

⁵⁶ Ibid., 17.

⁵⁷ Ibid., 19.

⁵⁸ House of Commons, *Migration Crisis*, 4.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Poddar, "European Migrant Crisis: Financial Burden or Economic Opportunity", 2.

kemampuan bagi pengungsi untuk dapat terjun dalam pasar kerja melalui pelatihan bahasa nasional dan pelatihan.⁶¹

Dinamika Politik Domestik dan Referandum 23 Juni 2016

Faktor terakhir yang menyebabkan Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa adalah dinamika politik domestik Inggris yang secara umum memberikan peluang penguatan posisi kelompok penolak integrasi Inggris di Uni Eropa. Menurut Gourevitch bahwa politik internasional dan struktur domestik saling mempengaruhi.⁶² Situasi Politik menjadi faktor yang menentukan dalam proses integrasi ekonomi dalam suatu kawasan.⁶³ X. Dai menjelaskan bahwa keputusan negara untuk patuh dalam organisasi internasional dipengaruhi oleh tingkat elektoral konstituen domestik.⁶⁴ Dai juga menjelaskan bahwa politik domestik berpengaruh pada pilihan bergabung dalam organisasi internasional dan mematuhi aturan yang dihasilkan organisasi tersebut.⁶⁵ Hugo Grotius menjelaskan bahwa negara merupakan representasi dari kemauan yang dikumpulkan dari tiap individu dalam lingkup hukum internasional.⁶⁶ Dinamika politik domestik yang mempengaruhi sikap negara untuk menarik diri dari keanggotaan integrasi kawasan perlu diperhatikan sebagai hasil dari interaksi antar pemimpin, pemilih, kondisi politik, ekonomi, dan lingkungan suatu negara.⁶⁷

Dinamika politik domestik Inggris terbentuk melalui penguatan kelompok penolak integrasi Uni Eropa dimulai dari dorongan terhadap pelaksanaan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa sampai masa kampanye referendum yang menghasilkan keputusan Inggris menarik diri dari Uni Eropa. Pertama, penyebab awal untuk mengusulkan pelaksanaan referendum terjadi pada era pemerintahan Tony Blair dan Gordon Brown sebagai Perdana Menteri Inggris yang memiliki pandangan untuk meningkatkan peran Inggris di Uni Eropa. Tony Blair mendorong peran aktif Inggris memperbarui perjanjian Uni Eropa seperti perjanjian Amsterdam dan Nice. Inggris memiliki ketertarikan dalam pembahasan integrasi ekonomi dan keuangan, menyetujui bab sosial dari perjanjian Uni Eropa dan mendorong perluasan Uni Eropa ke bagian timur.⁶⁸ Pada tahun 2004 Tony Blair berpartisipasi dalam pertemuan pemimpin Uni Eropa untuk menyetujui Konstitusi Eropa yang dilaksanakan di Roma, Italia.⁶⁹ Selanjutnya peran dari Perdana Menteri Gordon Brown dari partai Buruh dalam era pemerintahannya masih menjaga hubungan baik dengan Uni Eropa terbukti melalui upaya Gordon Brown terbang ke Lisbon untuk menandatangani perjanjian Lisbon pada tahun 2007.⁷⁰

Kedua, persetujuan terhadap Konstitusi Eropa dan perjanjian Lisbon oleh pemerintahan Inggris telah membangkitkan kembali kelompok anti Uni Eropa untuk mendorong pelaksanaan referendum khususnya dari partai Konservatif yang menganggap kebijakan tersebut telah memberikan kedaulatan Inggris kepada Uni Eropa. Perwakilan partai Konservatif dari bagian kebijakan luar negeri Liam Fox menyatakan bahwa Konstitusi Eropa buruk bagi Inggris dan Eropa.⁷¹ Penolakan tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk

⁶¹ Ibid., 6-7.

⁶² Chaudoin, Milner, Pang, "International System and Domestic Politics: Linking Complex Interactions with Empirical Models in International Relations"

⁶³ Hosny, "Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature", 146.

⁶⁴ Citra Hennida, *Rezim dan Organisasi Internasional* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 144.

⁶⁵ Ibid., 147.

⁶⁶ Nagan, dan Haddad, "Sovereignty in Theory and Practice", 448.

⁶⁷ Bier, Bernard, Backus, dan Hills, "Political Dynamics Determined by Interactions Between Political Leaders and Voters", 3.

⁶⁸ Sorokina, *Great Britain and the European Integration*, 50.

⁶⁹ Cordon, "Blair Signs New EU Constitution"

⁷⁰ Weaver, dan Radnofsky, "Brown Flies to Lisbon for Belated EU Treaty Signing"

⁷¹ Tempest, "British Vote on Constitution Shelved"

kabinet bayangan yang mendorong pelaksanaan referendum terkait pembentukan Konstitusi Eropa karena dianggap sebagai sebuah ancaman kedaulatan negara.⁷² Penolakan kembali dilakukan oleh partai konservatif terhadap Uni Eropa terkait pembentukan perjanjian Lisbon. Partai Konservatif memandang bahwa perjanjian Lisbon merupakan salinan dari Konstitusi Eropa sehingga partai mengajukan proposal penundaan persetujuan terhadap perjanjian Lisbon.⁷³ Penolakan partai Konservatif diutarakan melalui pernyataan David Cameron sebagai pimpinan partai bahwa apabila perjanjian Lisbon tetap dipertahankan ketika pemilihan umum parlemen memenangkan partai Konservatif akan memimpin kampanye *No vote* dalam pelaksanaan referendum.⁷⁴ David Cameron sebagai pemimpin partai Konservatif menyatakan apabila terpilih dalam pemilihan umum akan melaksanakan referendum dari masyarakat sebagai syarat untuk transfer kewenangan Inggris kepada Uni Eropa.⁷⁵

Ketiga, terpilihnya partai Konservatif sebagai partai pemenang dalam pemilu tahun 2010 memberikan ruang bagi partai dan pejabatnya untuk melaksanakan rencana referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa dengan terlebih dahulu menjalin koalisi untuk memenangkan pemilihan Perdana Menteri. Terbentuk koalisi pemerintahan dalam pemilihan Perdana Menteri Inggris tahun 2010 antara partai Konservatif dan Liberal Demokrat yang memenangkan David Cameron sebagai Perdana Menteri ke-52 dan Nick Clegg sebagai wakil.⁷⁶ Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam manifesto masing-masing partai dalam pemilihan umum terjadi kesepakatan bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan Uni Eropa dapat diselesaikan melalui pelaksanaan referendum.⁷⁷

Keempat, kewenangan David Cameron untuk menetapkan jadwal pelaksanaan referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Urutan dalam proses penetapan pelaksanaan referendum oleh David Cameron adalah sebagai berikut (1) pada tahun 2005 partai Konservatif dibawah pimpinan David Cameron berjanji untuk melaksanakan referendum terkait persetujuan Konstitusi Eropa dalam manifesto pemilihan umum 2005⁷⁸; (2) David Cameron pada tahun 2007 juga berencana melaksanakan referendum terkait perjanjian yang dibentuk setelah perjanjian Lisbon apabila menjadi Perdana Menteri, namun pada tahun 2009 David Cameron menyatakan tidak akan memenuhi janjinya terkait pelaksanaan referendum terhadap perjanjian Lisbon karena perjanjian tersebut telah disetujui oleh semua negara anggota Uni Eropa; (3) Perdana Menteri David Cameron berpidato pada tanggal 22 Januari 2013 bahwa jika partai Konservatif menang dalam pemilihan umum selanjutnya akan melakukan negosiasi ulang terkait hubungan Inggris dengan Uni Eropa dan memberikan bagi warga negara Inggris pilihan untuk tetap atau meninggalkan Uni Eropa dengan pelaksanaan maksimal akhir tahun 2017⁷⁹; dan (4) pada tanggal 20 Februari 2016, Perdana Menteri David Cameron mengumumkan tanggal pelaksanaan referendum yaitu 23 Juni 2016 setelah melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait perubahan aturan keanggotaan Inggris dalam beberapa sektor kebijakan pada bulan Februari 2016.⁸⁰ Hasil referendum diumumkan secara nasional pada tanggal 24 Juni 2016 yang dimenangkan oleh kelompok pendukung Inggris keluar dari Uni Eropa serta diikuti pengunduran diri David Cameron sebagai Perdana Menteri.⁸¹

⁷² Sorokina, *Great Britain and the European Integration*, 54.

⁷³ Sorokina, *Great Britain and the European Integration*, 55-56.

⁷⁴ Helm, dan McDonald, "Tory Turmoil Over EU as Ireland Says Yes to Lisbon Treaty"

⁷⁵ Anon, "Timeline: Campaign for a European Union Referendum"

⁷⁶ Wintour, "David Cameron and Nick Clegg Lead Coalition into Power".

⁷⁷ Sorokina, *Great Britain and the European Integration*, 67.

⁷⁸ Anon, "Timeline: Campaign for a European Union Referendum"

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Anon, "EU Referendum Timeline: Countdown to the Vote"

⁸¹ Foster, "EU Referendum 2016 Aftermath: All the Key Dates: When will Britain Leave the EU?"

Kelima, penetapan pelaksanaan referendum tersebut menjadi pintu masuk bagi pembentukan dinamika politik domestik Inggris selama masa kampanye untuk mempengaruhi hasil referendum yang memutuskan Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa. Ada empat faktor dinamika politik domestik yang mempengaruhi masa kampanye referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa, yaitu gerakan kampanye yang melibatkan pemimpin partai politik dan pejabat publik dalam referendum untuk mempengaruhi pemilih mendukung Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa melalui peran partai Konservatif dan United Kingdom of Independence Party (UKIP). Penetapan oleh *Inggris's independent election regulator* atau Komisi Pemilihan UKIP pada bulan April 2016 terkait *Vote Leave* sebagai kampanye resmi dari kelompok yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa direspon dengan sungguh-sungguh oleh UKIP sebagai salah satu bagian dari kelompok tersebut.⁸² Pemimpin UKIP Nigel Farage dalam masa kampanye menyatakan bahwa Uni Eropa telah gagal untuk menangani permasalahan imigrasi dan keamanan di Eropa dengan membiarkan kelompok ekstrimis agama tertentu menyerang negara Barat.⁸³ Kampanye partai dan pejabat politik selanjutnya dari partai Konservatif. Kampanye penolakan partai Konservatif terhadap keanggotaan Uni Eropa didukung oleh menteri senior kabinet dan perwakilan parlemen. Salah satunya adalah Boris Johnson sebagai walikota London dan politikus Konservatif yang cukup terkenal.⁸⁴ Boris Johnson melihat permasalahan imigrasi menjadi alasan utama pentingnya Inggris keluar dari Uni Eropa sehingga apabila tetap menjadi bagian dari Uni Eropa maka Inggris tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.⁸⁵ Tokoh partai Konservatif lainnya yang mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa adalah Michael Gove. Michael Gove berpendapat bahwa dengan Inggris keluar dari Uni Eropa, maka akan memberikan kekuasaan baru bagi Parlemen Skotlandia untuk menangani permasalahan imigrasi.⁸⁶

Faktor kedua adalah peran media massa dalam mempengaruhi pandangan masyarakat untuk menentukan pilihan pada referendum. Media massa yang dikenal berpihak untuk mengkampanyekan Inggris keluar dari Uni Eropa adalah *The Daily Express* yang menunjukkan data bahwa 75 % dari semua artikelnya berisi kampanye penolakan Uni Eropa, dan hanya 5 % yang berisi dukungan terhadap integrasi kawasan Eropa.⁸⁷ Selanjutnya adalah *The Daily Mail* dengan komposisi 61 % dibanding 14 % antara artikel yang mendukung keluar dari Uni Eropa dan artikel mendukung tetap menjadi anggota Uni Eropa. Mayoritas artikel dari *The Sun*, *The Daily Mail*, dan *The Daily Express* berisi dukungan terhadap kelompok yang menolak Uni Eropa. Isi dari pemberitaan media tersebut adalah berkaitan dengan isu kedaulatan dan migrasi.⁸⁸

Faktor ketiga berkaitan dengan latar belakang pemilih dalam referendum yang memberikan ruang bagi dukungan terhadap kelompok penolak integrasi Uni Eropa. Pemilih tersebar dalam berbagai kelompok yang berbeda tergantung dengan status sosial, ekonomi dan politik. Perilaku dari masing-masing kandidat dan kelompok pemilih ditentukan oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi diantara sistem politik.⁸⁹ Latar belakang pemilih Inggris yang mendorong menentukan pilihan untuk keluar dari Uni Eropa pada referendum, yaitu (1) latar belakang pemilih yang telah mendukung UKIP pada pemilihan Parlemen Eropa tahun 2014 juga memilih untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa⁹⁰; (2) pemilih yang

⁸² Ford, dan Goodwin, "Britain after Brexit", 23.

⁸³ James, "Britain's Rival EU Camps Resume Campaign as Polls Show Momentum for 'In'"

⁸⁴ Ford, dan Goodwin, "Britain After Brexit", 23.

⁸⁵ Mason, Stewart, Asthana, "Boris Johnson Insist Immigration Pledge is Not Bid to Oust Cameron"

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Levy, Aslan, dan Birony, "The Press and the Referendum Campaign", 33.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Bier, Bernard, Backus, dan Hills, "Political Dynamics Determined by Interactions Between Political Leaders and Voters", 5.

⁹⁰ Uberoi, *European Union Referendum 2016*, 19-20.

belum sarjana⁹¹; (3) tingkat kesejahteraan juga mempengaruhi pandangan pemilih yaitu terdapat hubungan yang tinggi antara masyarakat dari kelas pekerja kasar dan tidak tetap, pengangguran dan pensiun untuk memilih keluar dari Uni Eropa⁹²; (4) terdapat data juga menjelaskan bahwa diantara 144 kewenangan lokal yang termasuk dalam kategori pedesaan menghasilkan 25 atau 17 % menunjukkan pemilihnya 50 % memilih tetap menjadi bagian dari Uni Eropa, namun 44 kewenangan lokal di pedesaan menunjukkan pemilihnya 60 % lebih memilih keluar dari Uni Eropa⁹³.

Faktor keempat yang mempengaruhi dinamika politik domestik Inggris pada referendum keanggotaan di Uni Eropa adalah adanya berbagai isu utama yang menjadi perhatian masyarakat dalam tingkat nasional selama masa kampanye referendum. Ada tiga isu utama yang menjadi perhatian publik dalam tingkat nasional selama masa kampanye referendum sehingga mempengaruhi pemilih untuk memilih Inggris menarik diri dari Uni Eropa, yaitu (1) isu ekonomi dijelaskan dengan adanya penjelasan pendukung Inggris menarik diri dari Uni Eropa bahwa Inggris lebih makmur apabila diluar Uni Eropa dan Michael Gove dan Boris Johnson dalam sebuah artikel menjelaskan manfaat untuk Inggris menarik diri dari Uni Eropa adalah peningkatan gaji; (2) isu imigrasi bagi kelompok penolak tersebut menyarankan pemilihannya menolak perluasan Uni Eropa dalam menerima keanggotaan negara Albania, Macedonia, Serbia dan Turki⁹⁴ dan isu imigrasi menjadi berpengaruh karena terdapat laporan dari *MigrationWatch* bahwa setengah juta pengungsi dapat datang di Inggris setelah tahun 2020 karena peraturan Uni Eropa terkait pergerakan bebas dari masyarakat⁹⁵ dan (3) *National Health Service* (NHS)⁹⁶ bagi kelompok penolak meyakini dampak dari keanggotaan Inggris di Uni Eropa adalah tiap minggu Inggris mengeluarkan biaya £ 350 juta untuk keanggotaan Uni Eropa⁹⁷ sehingga kampanye untuk meninggalkan Uni Eropa mendapatkan dukungan dan menarik bagi pemilih dari beragam usia dengan adanya berita terkait pembebasan dana £ 350 juta dari Uni Eropa untuk NHS apabila Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa.⁹⁸

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan data dan argumentasi tersebut, penulis menentukan tiga pokok jawaban terkait penyebab Inggris menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa, meskipun telah mendapatka berbagai keuntungan dan kemudahan sebagai negara anggota, yaitu (1) sikap kritis Inggris terhadap aturan atau perjanjian yang dibuat oleh Uni Eropa terkait permasalahan kedaulatan Inggris untuk menjaga independensi penerapan aturan dalam negeri; (2) timbulnya beban ekonomi dan sosial yang ditanggung Inggris sebagai negara anggota Uni Eropa; dan (3) dinamika politik domestik Inggris yang memberikan kesempatan bagi kelompok penolak Uni Eropa dalam mempengaruhi pilihan pemilih pada referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

⁹¹ Ibid., 20-21.

⁹² Ibid., 21-22.

⁹³ Ibid., 22-23.

⁹⁴ Ford, dan Goodwin, "Britain After Brexit", 24.

⁹⁵ Mason, "*Labour Voters in the Dark About Party's Stance on Brexit, Research Says*"

⁹⁶ Campbell, Brindle, Butler, "*What Would Brexit Mean for the NHS, Social Care and Disabled People?*"

⁹⁷ Ford, dan Goodwin, "Britain After Brexit", 24.

⁹⁸ Anon, "*Eight Reasons Leave Won the UK's Referendum on the EU*"

Daftar Pustaka

BUKU dan JURNAL

- Bell dan Hindmoor. "A State Centric Relational Approach, Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society." *Cambridge University Press*.
- Bell, Stephen, dan Andrew Hindmoor. "Rethinking Governance: The Centrality of the State in Modern Society." *Cambridge University Press*.
- Clark, Ken, Stephen Drinkwater, dan Catherine Robinson. "Migration, Economic Crisis and Adjustment in the UK." IZA Discussion Paper, No. 8410 (2014).
- Chaudoin, Stephen, Helen V. Milner, dan Xun Pang. "International System and Domestic Politics: Linking Complex Interactions with Empirical Models in International Relations" <https://www.princeton.edu/>.
- Druol, Emmanuel Mourlon, "The UK's EU Vote: The 1975 Precedent and Today's Negotiation." *Bruegel Policy Contribution* (2015).
- Duell, Nicola, Lena Thureau, dan Tim Vetter. "Long term Unemployment in the EU: Trends and Policies." *Bertelsmann Stiftung* (2006).
- European Union, *Treaty on European Union*. Journal of the European Communities: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_en.pdf, 1992.
- Feng dan Genna. "Regional Integration and Domestic Institutional Homogeneity: A Comparative Analysis of Regional Integration in the Americas, Pacific Asia and Western Europe."
- Feng, Yi, dan Gaspare M. Genna. "Regional Integration and Domestic Institutional Homogeneity: A Comparative Analysis of Regional Integration in the Americas, Pacific Asia and Western Europe" *Review of International Political Economy*, Vol.10. No. 2. Pp. 278-309, Taylor & Francis Ltd (2003).
- Ford, Robert, dan Matthew Goodwin. "Britain after Brexit" *Journal of Democracy* (2017).
- Gehring, Thomas. "Integrating Integration Theory: Neo-functionalism and International Regimes." *Global Society*, Vol. 10, No. 3 (1996).
- Hathway, Oona A. "International Delegation and State Sovereignty." *Duke University School of Law* (2014).
- House of Commons. *Migration Crisis*. London: www.parliament.uk/homeaffairscom, 2016, 4.
- Hosny, Amr Sadek. "Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature." *International Journal of Economy, Management and Social Science* (2013).
- Keep, Matthew *The UK's Contribution to the EU Budget*. House of Commons Library, 2017, 3.
- Levy, David, Billur Aslan, dan Diego Birony, "The Press and the Referendum campaign," Dalam *EU Referendum Analysis 2016: Media, Voters, and the Campaign* (England: The Centre for the Study of Journalism, Culture and Community. Bournemouth University, 2016).
- Marks, Gary, et. al. "European Integration from the 1980s: State Centric v. Multi-Level Governance." *Journal of Common Market Studies*, Vol. 34, No. 3 (1996).
- Perisic, Bojana. "Britain and Europe: a History of Difficult Relations." *Institute for Cultural Diplomacy* (2010).
- Poddar, Shubham. "European Migrant Crisis: Financial Burden or Economic Opportunity." *Social Impact Research Experience* (2016).
- Sorokina, Maria. *Great Britain and the European Integration*. Brno: Masark University, 2014.
- Spicker, Paul. *The Welfare State: a General Theory*. London: Sage Publication, 2000.
- Springford, John, Simon Tiford, dan Philip Whyte. "The Economic Consequences of Leaving the EU." *Centre for European Reform* (2014).
- Sweet dan Sandholtz. "European Integration and Supranational Governance." *Journal of European Public Policy* (1997).

Uberoi, Elise. *European Union Referendum 2016*. House of Commons Library, 2016, 18.

ARTIKEL ONLINE

- Anon. "Eight Reasons Leave Won the UK's Referendum on the EU." *BBC News*, 24 Juni 2016. <http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36574526> (diakses pada 20 Mei 2017).
- Anon. "Migrant Crisis: What is the UK Doing Help?." *BBC News*, 28 Januari 2016. <http://www.bbc.com/news/uk-34139960> (diakses pada 11 Mei 2017).
- Anon. "EU Refrendum Results." *BBC News*, 24 Juni 2016. http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results (diakses pada 28 September 2016).
- European Union. "The EU in Brief." *Europa*, 28 September 2016. https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en (diakses pada 28 September 2016).
- Giles, Chris. "What Has the EU Done for the UK?." *Financial Times*, 31 Maret 2017. <https://www.ft.com/content/202a6oco-cfd8-11e5-831d-09f7778e7377> (diakses pada 1 April 2017).
- James, William. "Britain's Rival EU Camps Resume Campaign as Polls Show Momentum for "In"." *Reuters*, 20 Juni 2016. <http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-idUSKCN0Z508B> diakses pada 20 Mei 2017).
- Lewis, Kayleigh. "What has the European Union Ever Done for Us?." *Independent*, 25 Juni 2016. www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-what-has-european-union-done-for-us-david-cameron-brexite-a6850626.html. (diakses pada 28 September 2016).
- Mason, Rowena, Heather Stewart, dan Anushka Asthana, "Boris Johnson Insist Immigration Pledge is not Bid to Oust Cameron" *The Guardian*, 1 Juni 2016. <https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/01/boris-johnson-insists-not-presenting-post-cameron-government-vote-leave> (diakses 20 Mei 2017).
- European Union, "Towards a Single Currency: a Brief History of EMU." *Europa* 19 Juli 2011. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3A125007> (diakses pada 23 April 2017).
- Parliament. "The ERM and the Single Currency." *Parliament UK*, April 2013. <http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-europe/overview/britain-joins-erm-to-introduction-of-single-currency/> (diakses pada 23 April 2017).
- Pettinger, Tejvan. "Economic Problems of European Union." *Economicshelp*, 14 Januari 2013. <http://econ.economicshelp.org/2007/03/economic-problems-of-european-union.html> (diakses pada 7 Mei 2017).
- Statista. "Net UK Contribution to the European Budget From 2009/2010 to 2015/2016", *Statista*, 2017. <https://www.statista.com/statistics/316736/uk-united-kingdom-net-contributions-to-european-union-budget-eu/> (diakses pada 7 Mei 2017).
- Statista. "Share of Total Contributions to the European Union Budget in 2016 by Member State." *Statista*, 2017. <https://www.statista.com/statistics/316691/european-union-eu-budget-share-of-contributions/> (diakses pada 7 Mei 2017).